



## Dari Server Error, Zonasi, hingga Masalah KK

Karut Marut PPDB SMP Negeri di Kota Jogja Berlanjut

**JOGJA** - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* SMP negeri di Kota Jogja dinilai Forum Pemantau Independen (Forpi) setempat semakin amburadul. Itu lantaran *server* sempat eror. Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba menduga, pemkot tak

benar-benar siap menggelar PPDB *online* untuk SMP negeri. Tapi terlalu dipaksakan.

"Ini rawan gugatan. Karena masyarakat kesulitan mengakses *server* dan harus bolak-balik ke warnet. Masih harus menunggu. Belum lagi legalisasi akta kelahiran maupun kartu keluarga," beber Kamba, sapaan akrabnya, kemarin (28/6).

Menurut Kamba, karut marut PPDB *online* bukan sekadar urusan *server*. Tapi juga masalah pengaturan zonasi sekolah. Dia menilai, masyarakat seolah dipaksa untuk siap dan mengikuti segala proses yang ditentukan dinas pendidikan. ▶ *Baca Dari... Hal 7*



**HARUS VALID:** Peserta PPDB memverifikasi data pendaftaran online di SMK Negeri 3 Jetis, Kota Jogja kemarin (28/6).

Instansi

Nilai Berita

la

# Dari Server Error, Zonasi, hingga Masalah KK

Sambungan dari hal 1

Padahal sarana dan prasarana tak sepenuhnya mendukung. "Meskipun niatnya bagus, kalau belum terpenuhi *toh* jadi persoalan juga," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Hari Suasana membantah ketidaksiapan pelaksanaan PPDB. Masalah *server error*, menurut Edy, karena belakangan diketahui ada lima rukun warga (RW) baru yang belum dihitung, ketika proses pendaftaran PPDB dibuka beberapa waktu lalu. Itulah yang menyebabkan beberapa pendaftar tak bisa mendapatkan informasi jarak sekolah yang dituju dengan lokasi RW asal mereka. Sementara jika tak memasukkan informasi jarak, maka pendaftar dianggap sebagai penduduk luar Kota Jogja.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan, maka *entry* data kami *off* dulu pada Selasa (26/6) siang. Untuk menghitung jarak zonasi kelima RW itu," jelas Edy.

Dampaknya, RW lama di sekitar lima RW tersebut juga harus dihitung ulang. Total ada 17 RW yang harus mengalami perubahan. Ketika itu Edy tak ingat pasti kelima RW yang dimaksud. Dia hanya ingat RW 07 di Kadipaten. Nah, wilayah terdampak di sekitarnya adalah RW 05 dan 06, sehingga jarak zonasi sekolah di sekitar kawasan tersebut harus dihitung ulang.

Edy menjamin *server* bisa kembali dibuka sejak kemarin (28/6), setelah ada perbaikan sistem. Ihwal pendaftar diminta *entry* data ulang, kata Edy, demi mantapkan pilihan. Ini sebagai dampak adanya perubahan jarak zonasi sekolah.

Lebih lanjut Edy mengakui adanya kendala lain dalam proses PPDB SMP negeri. Yakni banyaknya pendaftar keliru menuliskan nomenklatur RW dan RT, namun kemudian mereka protes karena data tidak keluar. Setelah ditelusuri, peserta tersebut hanya kurang cermat mengisi data. Ada juga pendaftar yang telah memasukkan nomor ujian, namun tak muncul nomor induk kependudukannya. "Setelah kami cermati secara manual ternyata anak itu dulu pindah kartu keluarga, tapi ya protes," sesalnya.

Edy menegaskan, pencermatan data perlu dilakukan oleh setiap pendaftar. Sebab, setelah diverifikasi data tak bisa diubah. Nah, data inilah yang harus di-*print* sebagai syarat pengajuan pendaftaran.

Kabid Pengembangan Data Kependidikan Samiyo menambahkan, sejauh ini banyak yang salah memahami hak sebagai peserta PPDB. Bahwa jika sudah punya nomor induk kependudukan (NIK) Kota Jogja lantas mempunyai hak PPDB. Dia menilai, selama ini banyak orang yang memaksakan untuk bisa dianggap sebagai warga Jogja. Fenomena ini terjadi karena ba-

nyaknya orang tua calon siswa yang menitipkan anak-anak mereka di KK warga Kota Jogja. Sementara domisili orang tua siswa di luar Kota Jogja. "Padahal Basis data kami adalah orang tua. Apa pun yang terjadi sesuai KK orang tua," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIJ Baskara Aji mengatakan, adanya orang tua siswa yang menitipkan anak di KK warga Kota Jogja bisa menggagalkan tujuan sistem zonasi sekolah. Aji menegaskan, sistem zonasi untuk mendekatkan siswa dengan sekolah. "Orang tua itu ya *ngopeni* anaknya sendiri. Tak usah dititip-titipkan, *toh* sekolah di mana pun bagus," tuturnya.

Sementara itu, guna mengantisipasi potensi gugatan terkait pelaksanaan PPDB SMP negeri, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ membuka Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB 2018. Kepala Perwakilan ORI DIJ Budhi Masturi mengatakan, sekretariat pengaduan sebagai tindak lanjut komitmen PPDB bersih dari maladministrasi.

"Sekretariat ini semacam titik kumpul untuk koordinasi, bertukar informasi untuk menangani satu kasus," jelasnya.

Posko pengaduan akan mendiskusikan isu dan mengkajinya lebih lanjut sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan PPDB. Untuk meminimalisasi kesalahan serupa di tahun berikutnya. (tif/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005